

**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI DESA JETIS
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK**

Ike Wahyu Nur Tyas

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (Ikewahyunurtyas@gmail.com)

Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc

Abstrak

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah Indonesia dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran serta ditujukan untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan modal usaha sebanyak 100.000.000,00,- (seratus juta) untuk setiap desa yang menjadi sasaran PUAP.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi hasil dari pelaksanaaan program PUAP di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Adapun subjek penelitian ini yaitu pelaksana dan pemanfaat program yang terdiri dari penyuluh pendamping PUAP, pengurus gapoktan, pengurus poktan dan anggota poktan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, observasi, serta wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PUAP dapat memberikan hasil yang positif. Dilihat dari pendekatan evaluasi formal yang merujuk pada indikator-indikator keberhasilan (*outcome*) program PUAP. Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha yang dikembangkan melalui bantuan modal usaha saprodi (pupuk, bibit dan obat-obatan) dari 100.000.000,00,- menjadi 124.000.000,00,- juta. Namun, belum ada peran gapoktan dalam pemasaran hasil pertanian. Adanya peningkatan jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan pinjaman bantuan modal usaha. Jumlahpetani dan buruh tani anggota yang mendapatkan pinjaman saprodi yaitu sebanyak 238 orang lebih banyak dibanding tahun 2011 yaitu berjumlah 175 orang. Sedangkan rumah tangga tani ada 175 KK yang telah mendapatkan bantuan modal usaha PUAP. Namun, bantuan modal usaha PUAP yang diberikan baru sebatas penyediaan saprodi. Selain itu adanya peningkatan aktivitas kegiatan agribisnis pada subsistem hulu dan budidaya. Namun, belum ada kegiatan untuk subsistem hilir atau pengelolaan hasil budidaya.

Adapun saran dalam penelitian ini diharapkan gapoktan untuk lebih mengoptimalkan tugasnya agar bisa membantu para petani dalam masalah pemasaran hasil pertanian. Serta dapat mengembangkan bantuan modal usaha PUAP yang diberikan di Desa Jetis agar tidak sebatas penyediaan saprodi dan dapat meningkatkan kegiatan usaha agribisnis khususnya pada pengelolaan hasil budidaya agar kesejahteraan masyarakat Desa Jetis bisa meningkat.

Kata Kunci: Evaluasi, Program PUAP.

Abstract

Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is one manifestation of the Indonesian government's efforts to develop agribusiness in accordance with the agricultural potential of the target villages and aimed to reduce poverty through the help of venture capital as 100.000.000.00 (one hundred million) for every village target PUAP.

This research is a qualitative descriptive study aimed to describe the evaluation of the results of the implementation of the program PUAP in the Jetis village, District of Pace Nganjuk. The subject of this research is the executor and beneficiary program consisting of companion extension PUAP, gapoktan administrators, trustees and members poktan. Data collection techniques used in the form of documentation, observation, and interview. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results showed that PUAP programs can provide positive results. Judging from the formal evaluation approach which refers to indicators of success (outcomes) PUAP program. This was evidenced by an increase in the ability gapoktan in facilitating and managing venture capital developed through the help of venture capital inputs (fertilizers, seeds and medicines) from 100.000.000.00, - be 124.000.000,00,-. However, there is no gapoktan role in the marketing of agricultural products. There is an increasing number of farmers, farm workers and farm households that obtain venture capital assistance loans. The number of farmers and farm workers that members get a loan production means that as many as 238 people more than in 2011 which amounted to 175 people. While there are 175 farm households households that have received assistance PUAP venture capital. However, venture capital assistance given PUAP new limited supply of inputs. In addition to an increase in the activity of agribusiness activities in the upstream subsystem and cultivation. However, there has been no activity for downstream subsystem or management of cultured

The suggestions in this study are expected gapoktan to further optimize its work in order to help farmers in agricultural marketing issues. And can develop PUAP venture capital assistance given in Jetis order not limited to the provision of inputs and can improve agribusiness activities, especially in the management of cultured order Jetis village public welfarecan be increased.

Keyword: Evaluation, Program PUAP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Data yang dipublikasikan BPS pada Mei 2014 menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia mencapai 40,83 juta orang per Februari 2014. Sebagai negara agraris, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Belajar dari kondisi yang dihadapi tahun 2005-2010, dimana permintaan bahan pangan yang semakin meningkat tidak dapat dibarengi dengan ketersediaan bahan pangan yang cukup, menyiratkan bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang penting dan perlu mendapatkan perhatian selanjutnya.

Pengembangan sektor pertanian diharapkan tidak hanya dapat menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri, melainkan juga akan menyokong pembangunan nasional dalam hal pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), Penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangannya tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, sayangnya angka kemiskinan khususnya di daerah perdesaan masih tinggi. Ini dapat dibuktikan dengan data BPS pada bulan Maret 2014 menunjukkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkaita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,28 juta orang atau 11,25% dari total penduduk Indonesia. Dari 28,28 juta orang penduduk miskin tersebut, sebanyak 17,77 juta orang atau 62% berada di perdesaan. (http://www.bps.go.id/kemiskinan_juli14.pdf).

Data tersebut menunjukkan bahwa daerah perdesaan menjadi daerah yang rentan terhadap kemiskinan. Untuk itu diperlukan program-program pembangunan yang dapat menjawab persoalan-persoalan perdesaan, seperti kemiskinan dan masalah produksi pertanian. Untuk itu upaya peningkatan produksi pertanian tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan secara nasional, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus upaya pengentasan kemiskinan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah pun berupaya untuk menangani satu persatu permasalahan melalui program-program

berbasis pemberdayaan perdesaan. Seperti salah satunya yaitu program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program PNPM – Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran serta ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Untuk pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Menteri Pertanian membentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.

Salah satu daerah yang melaksanakan Program PUAP adalah Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah pemasok beras tingkat regional dan nasional serta sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Jawa Timur yang sebagian besar lahannya ialah lahan pertanian. Mayoritas penduduk Kabupaten Nganjuk bermata pencaharian sebagai petani. Menurut data BPS, Nganjuk tahun 2013, 35% dari jenis tanah di Kabupaten Nganjuk adalah tanah sawah. Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian Lowisada, Anggun Shita. (2010), yaitu: "Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi sentra produksi komoditas bawang merah terbesar Di Jawa Timur serta sebagian besar lahannya adalah lahan pertanian". Program PUAP mulai diterapkan di Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2008 dengan jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tahun 2008-2011 sebanyak 150 Gapoktan.

Dari tujuh belas Kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang memiliki potensi wilayah agrarisangka tertinggi penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani adalah Kecamatan Pace dengan jumlah petani 20.064 orang. Salah satu desa di Kecamatan Pace yang menjadi desa sasaran program PUAP adalah desa Jetis. Desa Jetis merupakan desa kelima yang mendapat dana PUAP sejak tahun 2011. Berdasarkan data BPS Kecamatan Pace dalam angka tahun 2012 penduduk di desa Jetis yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 403 jiwa.

Desa Jetis mendapatkan dana bantuan modal usaha PUAP setelah melalui berbagai tahapan. Diawali dengan mengusulkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah terbentuk di desa Jetis yaitu Gapoktan "Muji Subur" menjadi penerima PUAP, kemudian membuat Rencana Usaha Bersama (RUB), yang dilanjutkan dengan adanya perjanjian kerjasama dan serah terima uang antara Dinas Pertanian dan Gapoktan Desa Jetis.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tani miskin, program PUAP menyalurkan bantuan modal usaha sebanyak 100.000.000,00 (seratus juta) untuk setiap desa yang menjadi sasaran PUAP. Untuk Desa Jetis bantuan modal usaha tersebut dibagi kepada dua Kelompok Tani (Poktan) yaitu "Loh Jinawi" dan "Karya Luhur". Untuk kelompok tani Loh Jinawi mendapat dana 60.000.000,00,- juta dengan jumlah anggota 75 orang dan "Karya Luhur" mendapat dana bantuan 40.000.000,00,- juta dengan jumlah anggota 100 orang. Kelompok Tani "Loh Jinawi" mendapatkan dana bantuan modal usaha lebih banyak karena luas area sawah Poktan "Loh Jinawi" adalah 60 Hektar, lebih luas dibandingkan dengan luas area sawah Poktan "Karya Luhur" yang hanya 40 Hektar. Dalam setahun petani di Desa Jetis dapat menanam sampai empat kali masa tanam yaitu padi, jagung, kedelai atau kacang tanah. Untuk bantuan modal Usaha di Desa Jetis diberikan melalui pinjaman modal usaha berupasaprodi melalui Gapoktan.

Setelah berjalan selama empat tahun, Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk perlu dievaluasi. Park (2010) dan Widodo (2009:111) mengemukakan kegiatan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil dan perkembangan dari pelaksanaan suatu program. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian ini berupaya untuk mengkaji Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Jetis Kabupaten Nganjuk.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni Bagaimana Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi hasil dari pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam bidang pertanian di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.
- b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang Evaluasi Program agar program bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan program-program yang dilaksanakan dalam upaya mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan.
- b. Bagi Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dengan adanya penelitian ini Desa Jetis sebagai pengelola dan pemanfaat Program PUAP dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan Program PUAP yang dapat menambah pengetahuan yang bersangkutan dalam mengevaluasi suatu program yang dilaksanakan. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan pihak yang terkait dapat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam pengelolaan program lainnya di masa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat Desa Jetis dalam hal ini Petani dan buruh tani sebagai pemanfaat Program dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan dan perkembangan program PUAP yang telah berjalan saat ini.
- d. Bagi Mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis evaluasi Program khususnya, Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dijelaskan Dye dalam widodo (2011:12) sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai bagian dari program PNPM-Mandiri. Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal kepada kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Gapoktan), yang selanjutnya akan diberikan kepada anggota kelompok tani (Poktan), baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumahtangga tani sebagai bantuan modal dalam kegiatan usaha pertanian. Sasaran yang hendak dicapai program ini antara lain: berkembangnya usaha agribisnis, berkembangnya Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani, dan berkembangnya usaha pelaku agribisnis perdesaan untuk meningkatkan

kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik telah di luncurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2008 dan telah diimplementasikan keseluruh wilayah negara Republik Indonesia.Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan kinerja program ini terutama jika dikaitkan dengan keberadaannya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, memberdayakan kelembagaan petani serta meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani, perlu dilakukan evaluasi. Berikut akan diuraikan beberapa tinjauan evaluasi kebijakan publik.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai.Secara singkat Widodo (2009:111) juga menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut Muhamdajir, dalam Widodo (2009:112) Evaluasi kebijakan publik juga merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat "membuat hasil", yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang telah ditentukan.

3. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Widodo (2007:112) membagi evaluasi menjadi dua tipe, yaitu :

a. Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*)

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakandiukur melalui sejauh mana tujuan program dapat dicapai, siapa yang paling diuntungkan, bagaimana perbandingan biaya dan manfaatnya, peristiwa baru apa yang muncul dari konsekuensi kebijakan.

b. Evaluasi proses (*process of public policy implementation*)

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat kesesuaian proses implementasi dengan petunjuk yang diterapkan, berapa biaya yang dikeluarkan, siapa yang menerima keuntungan/ target grup. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan diperlukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pemecahan masalah kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe evaluasi hasil, yaitu untuk mendeskripsikan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

4. Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik bukan hanya untuk memerlukan tipe evaluasi. Namun juga perlu untuk menentukan pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi. Berikut ini merupakan tiga pendekatan evaluasi menurut Dunn (1999:612) :

a. Evaluasi semu

Merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan infomasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.Asumsi dari pendekatan ini yaitu bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*).

b. Evaluasi Formal

Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil suatu kebijakan.B erbagai metode yang digunakan dalam pendekatan formal yaitu undang-undang, dokumen-dokumen program dan wawancara dengan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan kebijakan.

c. Evaluasi keputusan teoritis

Merupakan suatu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Dalam penelitian evaluasi hasil program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), menggunakan evaluasi formal sebagai pendekatannya, merujuk pada pendekatan formal, maka penelitian ini akan menggunakan tiga indikator keberhasilan (*outcome*) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2014.

B. Indikator Keberhasilan (*Outcome*) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Dalam kegiatan evaluasi diperlukan indikator. Suharsimi (2012) mengemukakan bahwa indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan.Diperlukannya

adanya indikator untuk mengevaluasi program karena keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu kegiatan dapat juga dipengaruhi oleh komponen atau subkomponen lainnya. Dalam suatu evaluasi formal, kebijakan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dapat dinilai berdasarkan indikator keberhasilan (*Outcome*) yang menurut dokumen pedoman pelaksanaan PUAP Tahun 2014 meliputi;

1. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha

Pengertian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) menurut Pedoman Umum PUAP (2014) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha. Sedangkan pengertian Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Gapoktan sebagai pengelola dana PUAP paling kurang dilengkapi pengurus yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dalam pengembangannya dapat dibentuk Unit Usaha Otonom yang ditetapkan berdasarkan musyawarah/rapat anggota. Susunan keanggotaan kelompok tani terdiri atas pengurus dan anggota. Pengurus terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 yang mengamanatkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan ketersediaan sarana produksi

(saprodi) dan unit usaha jasa permodalan lain sebagainya.

2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha

Menurut Pedoman PUAP 2014 Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Untuk setiap Gapoktan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- juta. Dana BLM PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sektor pertanian. Bantuan modal usaha tersebut berupa penyediaan sarana produksi padi (saprodi) berupa pupuk, bibit dan obat-obatan. Pinjaman modal usaha bertujuan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis serta memudahkan petani dalam hal permodalan.

3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.

Definisi Agribisnis Menurut Erna, Kadek. dkk (2014):

“Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran”.

Menurut Darius dalam Erna, Kadek.dkk (2014), dalam kegiatan usaha agribisnis ada empat sub sistem yaitu :

- a. Subsistem agribisnis hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti pupuk, pestisida, mesin, peralatan, dan benih atau bibit.
- b. Subsistem usaha tani sebagai produsen pertanian berfungsi melakukan kegiatan teknis produksi agar produknya dapat dipertanggung jawabkan baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Subsistem agribisnis hilir merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk

- pertanian primer menjadi produk olahan, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik.
- d. Subsistem lembaga penunjang merupakan seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis.

Menurut pedoman PUAP (2014) Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem yaitu:

- 1) Subsistem hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian.
- 2) Subsistem pertanian primer adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu.
- 3) Subsistem agribisnis hilir adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.
- 4) Subsistem penunjang adalah kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Untuk menentukan sumber data pada orang yang diwawancara peneliti menggunakan teknik *Purposive*. Menurut Sugiyono (2006) teknik *Purposive* adalah teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari penyuluh pendamping PUAP, pengurus Gapoktan, Pengurus dari masing-masing kelompok tani dan beberapa anggota kelompok tani. Sementara itu, berkaitan dengan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah Indikator keberhasilan (*Outcome*) Program PUAP tahun 2014 yaitu 1) Kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha ; 2) Jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; 3) Aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2010).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Desa Jetis terletak pada koordinat $7^{\circ}20' - 7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}5' - 112^{\circ}13'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 56 m di atas permukaan air laut, dengan luas desa 161.035 HA, luas pemukiman 36.880 HA dan luas sawah 110 HA. Wilayah Desa Jetis terdiri dari dua Dusun yaitu: Jetis dan Sonogabel. Secara administratif, desa Jetis terletak di wilayah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan berjarak sekitar 4 km dari Kecamatan Pace. Sedangkan jarak ke ibu Kota Kabupaten adalah 12 km dengan posisi dibatasi oleh wilayah-wilayah Desa tetangga.

- a. Sebelah utara : Desa Kecubung
- b. Sebelah Barat : Desa Bodor
- c. Sebelah Selatan : Desa Pacewetan
- d. Sebelah Timur : Desa Gemenggeng

2. Deskripsi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu terobosan Kementerian Pertanian yang berada dalam kelompok program "Pemberdayaan" bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri. PUAP dilaksanakan dengan fokus pada pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin khususnya petani diperdesaan.

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulan melalui koordinasi Gapoktan. Selama ini, permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses sumber permodalan sebagai contoh petani tidak mempunyai sumber permodalan atau uang untuk membeli pupuk dan keperluan pertanian lainnya dalam hal pengelahan pertanian. Serta kurangnya akses pada pemasaran hasil pertanian karena belum adanya mediator dalam kemitraan usaha hasil pemasaran dan penampungan hasil tunda jual para petani.

Selain itu masalah lain yang dihadapi petani yaitu organisasi tani yang masih lemah. Dalam hal ini, organisasi tani adalah gapoktan. Sayangnya, selama ini peran gapoktan masih sangat lemah karena belum adanya pelaksanaan tugas dari masing-masing pengurus gapoktan. Jadi gapoktan hanya sekedar ada dalam suatu Desa. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan program yang mampu memberdayakan sumber daya manusia (SDM) petani dan menyokong secara dana. Untuk itu, program PUAP dibentuk dengan tujuan :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan

- pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan PMT;
 3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan
 4. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sementara, indikator keberhasilan (*outcome*) dari Program PUAP antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha petani, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
3. Meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya, dan hilir) di perdesaan.

3. Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Jetis

Program PUAP mulai ada di desa Jetis sejak tahun 2011, tepatnya tiga tahun setelah diterapkan secara Nasional. Desa jetis mendapatkan dana bantuan modal usaha PUAP setelah melalui berbagai tahapan. Diawali dengan mengusulkan Gapoktan "Muji Subur" menjadi penerima PUAP. Kemudian membuat Rencana Usaha Bersama (RUB), yang dilanjutkan dengan adanya perjanjian kerjasama. Ketika kerjasama sudah terjalin kemudian dilakukan pakta integritas dan serah terima uang dari Dinas Pertanian kepada Gapoktan desa Jetis.

4. Evaluasi Keberhasilan (*Outcome*) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Jetis

Penelitian ini merupakan tipe evaluasi hasil. Widodo (2007:112) mengemukakan evaluasi hasil yaitu upaya untuk melihat ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dinilai melalui sejauh mana program dapat dicapai. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian evaluasi hasil ini adalah evaluasi formal. Dunn (1999:612) menambahkan bahwa pendekatan evaluasi formal digunakan melalui metode deskriptif

untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil suatu kebijakan. Dengan menggunakan berbagai dokumen-dokumen program maupun undang-undang. Secara formal terdapat tiga indikator keberhasilan (*outcome*) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang tertera dalam dokumen pedoman PUAP tahun 2014.

B. PEMBAHASAN

Sesuai pada pemaparan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana tentunya memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil kebijakan tersebut telah tercapai. Penilaian terhadap hasil kebijakan suatu program dapat dilihat melalui tujuan atau indikator-indikator keberhasilan (*outcome*) terkait program yang dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi diperlukan indikator. Indikator menurut Suharsimi (2012) dapat didefinisikan sebagai petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan. Diperlukannya adanya indikator untuk mengevaluasi program karena keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu kegiatan dapat juga dipengaruhi oleh komponen atau subkomponen lainnya.

Setelah berjalan selama empat tahun program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di Desa Jetis memberikan hasil yang cukup positif. Namun, dalam pelaksanaanya masih ada temuan-temuan yang menunjukkan bahwa program PUAP masih perlu pendampingan dan pengembangan. Untuk melihat hasil dari evaluasi tersebut peneliti menggunakan tiga indikator keberhasilan (*outcome*) program PUAP tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemampuan Gapoktan Dalam Memfasilitasi Dan Mengelola Bantuan Modal Usaha

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Muji Subur terbentuk sejak tahun 2008 yaitu tepatnya 3 (tiga) tahun sebelum program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) berjalan di desa Jetis. Pembentukan pertama kali gapoktan dilakukan dengan musyawarah desa. Sebelum program PUAP diterapkan di desa Jetis, gapoktan belum mampu menyusun, membuat rencana usaha bersama (RUB), rencana usaha kelompok (RUK), rencana usaha anggota (RUA), dan adanya keterbatasan kemampuan dalam menggulirkan dana bantuan modal usaha

PUAP serta belum adanya pelaksanaan tugas gapoktan secara maksimal yaitu, belum adanya kegiatan penyaluran uang pupuk langsung dari gapoktan ke kelompok tani, kurangnya koordinasi antara gapoktan dengan kelompok tani dan belum adanya pertemuan rutin antara gapoktan dengan kelompok tani dan anggota poktan, serta belum adanya kegiatan administrasi keuangan gapoktan, termasuk terkait penyaluran dan pengelolaan dana laporan tahunan keuangan gapoktan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan sebelumnya, setelah Program PUAP berjalan pada tahun 2011, kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha di desa Jetis mengalami peningkatan. Gapoktan mampu dalam menyusun, membuat Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Usaha Anggota (RUA). Kemampuan gapoktan dalam menyusun dan membuat RUB, RUK dan RUA tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi yang mengadakan pelatihan dan pendampingan pembuatan RUB, RUK dan RUA. Selain itu, telah adanya koordinasi antara gapoktan dan kelompok tani dalam penyaluran bantuan saprodi. Dengan begitu, salah satu tujuan dari keberadaan program PUAP yaitu meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan dapat terwujud. Tidak berhenti pada koordinasi, tapi juga berlanjut pada adanya pertemuan rutin yang dilakukan gapoktan dengan kelompok tani setiap awal tanam dan panen (pertemuan dilakukan setiap laporan keuangan masuk dan laporan keuangan keluar). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait pertemuan rutin yang dilakukan gapoktan dan poktan yang didampingi oleh penyuluh pendamping, pertemuan tersebut dilakukan setiap tiga sampai empat bulan sekali. Pertemuan itu digunakan sebagai sarana untuk membuat laporan rekapitulasi perkembangan dana PUAP serta untuk memecahkan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi gapoktan dan poktan dalam menjalankan program PUAP.

Selain adanya peningkatan dalam pengelolaan administrasi dana laporan keuangan gapoktan, juga adanya perkembangan dalam hal bantuan modal usaha. Adanya perkembangan bantuan modal usaha dibuktikan dengan bantuan modal usaha yang diberikan yang awalnya hanya berupa pinjaman saprodi berupa pupuk. Namun, sekarang sudah berkembang menjadi pinjaman saprodi berupa bibit dan obat-obatan. Berdasarkan hasil wawancara dan

pemaparan sebelumnya terkait tahap penyediaan saprodi, gapoktan menerapkan beberapa aturan terkait pendistribusian pupuk. Termasuk diantaranya adalah aturan bunga pinjaman yang diterapkan melalui musyawarah, dan pembagian kuota pupuk untuk masing-masing petani sesuai luas lahan pertanian. Gapoktan memberikan bunga pinjaman saprodi 2 % perbulan, dengan rincian 1 % untuk kesejahteraan anggota digunakan untuk administrasi serta operasional dan 1 % dimasukkan kedalam rekening PUAP yang akan digunakan untuk menambah modal gapoktan. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gapoktan yaitu peraturan tentang penggunaan hasil usaha dengan rincian: untuk 50% menambah modal gapoktan, penambahan modal gapoktan dengan dimasukkan kedalam rekening gapoktan yang akan dimanfaatkan untuk menambah modal gapoktan akan dipergunakan untuk bantuan modal usaha lainnya. Kemudian 30% pengurus yang terdiri dari untuk 10% pengurus gapoktan, pengurus gapoktan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 10% pengurus poktan "Loh Jinawi", 10% pengurus poktan "Karya Luhur". Pada masing-masing kelompok tani terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Selanjutnya untuk 15% pendampingan dan 5% administrasi dan operasional digunakan pada saat melakukan pertemuan rutin.

Selain itu, setelah program PUAP empat tahun berjalan, adanya perkembangan dana bantuan dari 100.000.000,00,- juta menjadi 124.000.000,00,- juta ini membuktikan bahwa gapoktan sudah mampu mengelola bantuan modal usaha tani. Menurut Muhadjur, dalam Widodo (2009:112) Evaluasi kebijakan publik juga merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat "membuatkan hasil". Sepaham dengan pernyataan diatas, dengan adanya evaluasi kebijakan ini peneliti bisa mengetahui hasil yang didapat dari perkembangan pelaksanaan program PUAP.

Temuan-temuan diatas juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 bahwa gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit penyediaan ketersediaan sarana produksi (saprodi) dan unit usaha jasa permodalan dan lain sebagainya.

Adanya sinergi antara indikator keberhasilan (*outcome*) program PUAP dengan data di lapangan, telah menggambarkan bahwa ada peningkatan kemampuan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal

usaha sebelum dan setelah berjalannya program PUAP di desa Jetis.Namun, keberadaan gapoktan juga seharusnya bisa membantu para petani dalam masalah pemasaran hasil pertanian yaitu adanya tunda jual yang nantinya masuk di sie gudang gapoktan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pemaparan penulis sebelumnya,fungsi pemasaran ini belum sepenuhnya terlaksana karena belum banyaknya dana dari gapoktan untuk membeli sebagian hasil panen tunda jual petani sehingga gapoktan tidak mempunyai alasan kuat untuk dapat menahan petani agar bersedia melakukan tunda jual hasil panen. Jadi belum ada peran gapoktan dalam hal pemasaran hasil pertanian.

2. Meningkatnya Jumlah Petani, Buruh Tani Dan Rumah Tangga Tani Yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha

Pembentukan kelompok tani di desa Jetis terlaksana jauh sebelum program PUAP berjalan di desa Jetis yaitu tahun 1977. Terbentuknya kelompok tani di desa Jetis atas prakarsa dan musyawarah masyarakat desa Jetis, dengan membentuk dua kelompok tani yaitu “Loh Jinawi” dan “Karya Luhur”.Jika merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENtan) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 tentang pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani, buruh tani maupun rumah tangga tani. Untuk itu adanya program PUAP diharapkan mampu mensejahterahkan kehidupan petani.

Tercetusnya program PUAP untuk mensejahterahkan kehidupan petani memang cukup beralasan, mengingat masih banyaknya petani dan buruh tani yang kesulitan dalam hal permodalan, berupa sulitnya melakukan pembelian pupuk karena tidak adanya biaya untuk pembelian pupuk yang terlalu mahal. Seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya, anggota kelompok tani yang ingin mendapatkan pupuk harus bayar dimuka terlebih dahulu karena belum adanya bantuan modal yang memberi pinjaman kepada anggota tani.Terkait jumlah mata pencarian penduduk Desa Jetis mayoritas penduduk desa Jetis bekerja disektor pertanian.Kondisi ini menyiratkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian ini begitu penting bagi masyarakat desa Jetis. Tercatat ada dua kelompok tani yaitu “Loh Jinawi” dengan luas area sawah 60 hektar dengan kepemilikan 75 orang petani. Serta untuk kelompok tani “Karya Luhur” ada 40 hektar

area sawah dengan kepemilikan 100 orang petani.

Setelah berjalannya Program PUAP pada tahun 2011, terjadi jumlah peningkatan petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan modal usaha PUAP. Serta adanya rencana pemecahan kelompok tani dari 2 dua kelompok tani menjadi tiga kelompok tani, karena adanya peningkatan luas area sawah yaitu dari kelompok tani “Loh Jinawi” yang dulu hanya 60 hektar menjadi 66 hektar dan dari luas area sawah kelompok tani “Karya Luhur” dari 40 hektar menjadi 44 hektar bertambahnya luas area sawah disertai dengan bertambahnya anggota peminjam pada masing-masing kelompok tani serta dikarenakan adanya perkembangan modal usaha yang sebelumnya Rp. 100.000.000,- juta berkembang menjadi Rp. 124.000.000,00,- juta dengan begitu akan semakin banyak kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan modal usaha.Menurut bapak Joko Nugroho selaku penyuluh pendamping PUAP Desa Jetis yang sudah penulis paparkan sebelumnya, bahwa hasil dari pinjaman saprodi nanti akan dikembangkan kembali menjadi simpan pinjam uang. Dari pernyataan Bapak Joko Nugroho tersebut telah membuktikan bahwa bantuan modal usaha PUAP di Desa Jetis baru sebatas penyediaan saprodi.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, peningkatan jumlah petani dan buruh tani mendapatkan modal usaha sejak tahun tahun 2011 yaitu anggota peminjam kelompok tani “Karya Luhur” dari 100 peminjam ada 65 orang adalah petani dan untuk buruh tani 35 orang peminjam. Untuk kelompok tani peminjam “Loh Jinawi” ada 48 orang adalah petani sedangkan buruh tani ada 27 orang. Setelah program PUAP berjalan ada penambahan jumlah peminjam yaitu dari tahun 2012 sampai sekarang sebanyak 238 orang. Adapun dengan rincian anggota peminjam kelompok tani “Karya Luhur” dari 119 orang anggota ada 74 orang adalah petani yang mendapatkan bantuan saprodi dan untuk buruh tani ada 45 orang. Untuk kelompok tani “Loh Jinawi” dari jumlah anggota peminjam 119 orang, 80 orang adalah petani yang mendapatkan pinjaman dan ada 39 orang buruh tani yang mendapatkan pinjaman.Sedangkan untuk rumah tangga tani dari jumlah Kartu keluarga (KK) rumah tangga tani sebanyak 310 KK, 175 KK diantaranya telah mendapatkan bantuan modal usaha PUAP.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan sebelumnya terkait keikutsertaan mereka menjadi anggota dari kelompok tani, lebih didasarkan pada kemudahan dalam hal permodalan, peningkatan kesejahteraan, serta

adanya pendampingan meski hanya terbatas pada proses awal tanam hingga pengeringan. Jenis bantuan pupuk yang diberikan kepada anggota tani antara lain pupuk Urea, ZA, TSP, NPK dan Organik. Adapun rincian untuk 1 hektar sawah diberikan pupuk jenis urea 300 kg, ZA 150 kg, TSP 50 kg, NPK 150 kg dan pupuk organik 100 kg.

Dengan demikian, berdasarkan pada pemaparan tersebut sudah membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah petani, buruh tani, rumah tangga tani yang mendapatkan modal usaha. Bantuan modal usaha yang diberikan dapat memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani seperti uang yang seharusnya untuk dibelikan pupuk bisa digunakan petani untuk keperluan lain serta mampu mengakomodir kepentingan petani untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit. Namun, keperluan petani dan buruh tani miskin tidak hanya saprodi petani juga perlu mengembangkan dan mengangkat derajat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Pada temuan dilapangan karena bantuan di Desa Jetis baru sebatas bantuan pinjaman saprodi. Masih banyak buruh tani yang memerlukan bantuan lain seperti bantuan simpan pinjam uang untuk penyewaan lahan pertanian tahunan.

3. Meningkatnya Aktivitas Kegiatan Agribisnis (Hulu, Budidaya Dan Hilir).

Agribisnis adalah suatu usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada bidang pertanian. Setidaknya ada empat rangkaian hasil kegiatan usaha pertanian yaitu: Subsistem hulu, usaha tani (budidaya), hilir, dan lembaga penunjang. Subsistem hulu menurut Pedoman Pelaksanaan PUAP dan Erna, Kadek, dkk(2014) adalah suatu kegiatan ekonomi yang menyediakan/ menghasilkan sarana produksi (input) pertanian (pupuk, obat-obatan, bibit). Sedangkan Sub sistem budidaya adalah kegiatan terencana pemelihara sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal untuk diambil manfaat/hasil panennya, dan untuk subsistem agribisnis hilir adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Desa Jetis adalah salah satu wilayah yang untuk agribisnisnya belum bisa berjalan secara maksimal, selain faktor tanah juga karena faktor rendahnya partisipasi SDM terbukti dengan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Jetis menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di Desa tersebut masih rendah, serta kurangnya modal pendanaan. Selain itu seperti yang penulis

paparkan sebelumnya, sebelum adanya program PUAP di desa Jetis, untuk subsistem hulu hanya sebatas untuk penyediaan pupuk. Serta belum adanya subsitem hilir untuk pengelolaan hasil panen. Hanya ada kegiatan budidaya yaitu berupa budidaya padi dan jagung yang hasilnya langsung dijual kepada pengebas tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu.

Setelah program PUAP berjalan pada tahun 2011 di desa Jetis, terjadi peningkatan kegiatan agribisnis pada subsitem hulu dan budidaya. Untuk subsistem hulu yaitu tidak hanya berupa aktivitas penyediaan pupuk, tetapi sudah ada peningkatan aktivitas untuk penyediaan obat-obatan dan bibit. Serta adanya penyuluhan dan pelatihan pengolahan pupuk organik. Namun, karena intensitas penyuluhan dan pelatihan pengolahan pupuk organik yang masih sangat kurang maka hasil yang didapat dari pelatihan pengolahan pupuk organik belum terlihat secara nyata.

Terkait dengan permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dimana penduduk yang ada di desa Jetis memiliki rata-rata pendidikan yang masih rendah, membuktikan bahwa semakin rendah pendidikan masyarakat desa tersebut maka program-program pembinaan dan pendampingan sebuah program semakin dibutuhkan, khususnya program-program yang berkaitan dengan mata pencaharian utama mereka. Untuk itu pelatihan pengolahan pupuk organik sebenarnya sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Jetis agar mampu memberikan pengetahuan masyarakat yang nantinya akan menjadi bekal guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada subsistem budidaya juga terjadi peningkatan tanaman yang telah dikembangkan. Sebelum adanya PUAP tanaman yang telah dikembangkan adalah tanaman padi dan jagung. Namun, sekarang berkembang dengan adanya budidaya kedelai dan kacang tanah disebabkan oleh keadaan tanah yang subur. Sayangnya, pada subsistem hilir belum ada perkembangan agribisnis atau pengelolaan hasil budidaya dari sebelum adanya program PUAP dan sampai program PUAP diterapkan, karena masih kurangnya modal usaha. Jadi, hasil budidaya juga hanya sebatas ditanam dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan agribisnis di Desa Jetis sebelum adanya program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dan setelah program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) berjalan, mengalami

peningkatan pada aktivitas kegiatan subsitem hulu dan budidaya. Namun, belum ada kegiatan untuk subsistem hilir atau pengelolaan hasil budidaya dari sebelum ada program PUAP dan setelah program PUAP berjalan di desa Jetis.

Hal ini disebabkan karena kurangnya modal usaha untuk melakukan pengelolaan hasil budidaya. Jika ada, pengolahan hasil budidaya akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menambah nilai jual hasil budidaya serta dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena adanya penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Dengan begitu salah satu tujuan program PUAP yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah bisa tercapai.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis mengenai Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) memberikan hasil yang positif untuk peningkatan kemampuan gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha. Setelah berjalannya program PUAP Gapoktan mampu dalam menyusun, membuat RUB, RUK, RUA. Serta sudah adanya koordinasi dan pertemuan antara gapoktan dan poktan, setelah berjalan selama empat tahun adanya peningkatan dalam penyaluran dan pengelolaan dana laporan keuangan, gapoktan mengembangkan dana bantuan dari 100.000.000,00,- juta menjadi 124.000.000,00,- juta. Namun, keberadaan gapoktan yang seharusnya juga bisa membantu para petani dalam masalah pemasaran hasil pertanian yaitu dengan adanya tunda jual yang nantinya masuk di sie gudang gapoktan. Akan tetapi, fungsi pemasaran ini belum sepenuhnya terlaksana karena belum banyaknya dana dari gapoktan untuk membeli sebagian hasil panen tunda jual petani sehingga gapoktan tidak mempunyai alasan kuat untuk dapat menahan petani agar bersedia melakukan tunda jual hasil panen. Jadi belum ada peran gapoktan dalam hal pemasarannya.

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) juga telah memberikan hasil positif bagi peningkatan jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha, dari tahun 2011 hingga sekarang petani yang mendapatkan bantuan Saprodi meningkat. Setelah program PUAP berjalan di desa Jetis kesejahteraan petani meningkat. Dibuktikan dengan meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan

rumah tangga tani yang mendapatkan dana bantuan modal usaha, Untuk sekarang jumlah petani dan buruh tani anggota yang melakukan pinjaman Saprodi yaitu sebanyak 238 orang lebih banyak dibanding tahun 2011 saat usulan pertama Rencana Usaha Kelompok (RUK) pada penyaluran awal PUAP yaitu berjumlah 175 orang. Sedangkan Rumah tangga tani dari jumlah Kartu keluarga (KK) rumah tangga tani sebanyak 310 KK, 175 KK diantaranya telah mendapatkan bantuan modal usaha PUAP.Petani dan buruh tani tidak mengalami kesulitan lagi dalam hal pembelian saprodi.Hal ini dipengaruhi oleh adanya bantuan saprodi yang diberikan kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani. Namun, bantuan modal usaha PUAP yang diberikan di Desa Jetis baru sebatas penyediaan saprodi yaitu penyediaan pupuk, bibit dan obat-obatan, karena alasan dana bantuan modal usaha PUAP yang terlalu sedikit jika harus dibagi-bagi melalui beberapa komponen kegiatan. Jadi untuk keperluan petani dan buruh tani lainnya diluar saprodi masih sangat dibutuhkan.

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) juga memberikan hasil yang positif untuk peningkatan kegiatan aktivitas agribisnis di desa Jetis. sebelum adanya program PUAP dan setelah Program PUAP berjalan, adanya peningkatan pada aktivitas kegiatan subsitem hulu dan budidaya. Untuk subsitem hulu, tidak hanya pada kegiatan penyediaan pupuk namun, sekarang sudah pada penyediaan bibit, serta adanya penyuluhan dan pelatihan pengolahan pupuk organik, meski hasilnya belum terlihat nyata.Sedangkan untuk peningkatan pada budidaya, yang dulu budidaya hanya pada penanaman padi dan jagung.Sekarang berkembang dengan adanya budidaya kedelai dan kacang tanah karena keadaan tanah yang subur.Namun, belum ada kegiatan untuk subsistem hilir atau pengelolaan hasil budidaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai sara masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengelola program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) supaya hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan kepada Gapoktan Muji Suburuntuk lebih mengoptimalkan tugasnya agar bisa membantu para petani dalam masalah pemasaran hasil pertanian.
2. Diharapkan kepada Gapoktan Muji Subur dan Poktan Karya Luhur dan Loh Jinawi untuk dapat mengembangkan bantuan modal usaha PUAP yang diberikan di Desa Jetis agar tidak sebatas penyediaan saprodi yaitu penyediaan pupuk, tapi juga kegiatan pinjaman untuk usaha ternak, dan kegiatan usaha simpan pinjam uang.

3. Diharapkan kepada anggota kelompok tani untuk dapat meningkatkan kegiatan usaha agribisnis di Desa Jetis khususnya pada pengelolaan hasil budidaya agar kesejahteraan masyarakat Desa Jetis bisa meningkat.

Online,
(http://www.bps.go.id/bris_file/kemiskinan_02jan14.pdf diakses tanggal 17 September 2014)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, N. William. 1999. Pengantar Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maleong, J. Lexy. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : PT. Remaja Rondakarya.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Publishing
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan publik formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: PT. Elex media komputindo
- Nganjuk Dalam Angka Badan Pusat Statisik Kabupaten Nganjuk 2013
- Kecamatan Pace Dalam Angka Tahun 2012

Peraturan

- Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/Ot.140/2/2008 tentang Pedoman PUAP
- Lampiran Pedoman Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman PUAP
- Pedoman Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01/Permentan/Ot.140/1/2014
- Petunjuk Teknis Pendamping PUAP Tahun 2014 oleh Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
- Data Demografi Desa Jetis tahun 2013 dan 2014

e- Journal

- Erna, Kadek. dkk. Pengaruh Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Simantri, (*Online*), (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=138848&val=1350>, 2014, diakses tanggal 8 November 2014)

- Lowisada, Anggun Shita, Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah (Studi Kasus di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Suko Kabupaten Nganjuk), (*online*), (jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/1028/943, 2014, diakses tanggal 10 November 2014)

Website

- Online,
(http://www.bps.go.id/bris_file/naker_05mei14.pdf diakses tanggal 17 Sepember 2014)